

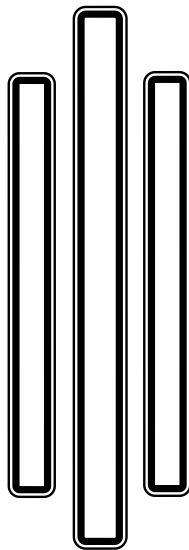


PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
(LPPD)**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2019**



Sukamara, Maret 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dapat terselesaikan pada waktunya.

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai dengan urusan kewenangannya.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sukamara menyampaikan Laporan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Tahun 2017. Urusan yang disampaikan dalam laporan ini meliputi urusan Pemerintahan Umum.

Semoga Laporan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Sukamara, 2 Maret 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara



SUTRISNO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19690918 199012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Hukum 1

 B. Gambaran Umum Daerah 2

 C. Kondisi Geografis Daerah..... 2

 D. Gambaran Umum Demografis 3

 E. Kondisi Ekonomi..... 3

 1. Potensi Unggulan Daerah 3

 2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB..... 5

BAB. II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 6

 A. Visi dan Misi 6

 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 8

 C. Prioritas Daerah 10

BAB. III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14

 A. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) 14

 1. Perangkat Daerah Pelaksana (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 14

 2. Program dan Kegiatan 14

 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 23

 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 26

 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah 29

 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 30

 7. Permasalahan dan Solusi 31

BAB. IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 34

 A. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 34

 1. Gangguan Yang Terjadi (Sara dan Konflik Lainnya) 34

 2. Penanggulangan dan Kendalanya 35

 B. Indikator Kinerja Kunci 39

BAB. V PENUTUP 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara tahun 2019 merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LPPD pada akhir Tahun Anggaran 2019, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan pembangunan pada urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Sukamara pada TA. 2019, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara. Pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah,
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Nomenklatur Kementerian Dalam

- Negeri Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri terjadi perubahan,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara,
 9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara,
 10. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2019.

B. Gambaran Umum Daerah

Luas Wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km² dengan jumlah Penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 20.302 Kepala Keluarga dan 64.994 jiwa. (data Disdukcapil & KB Kab. Sukamara)

Batas Wilayah Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

C. Kondisi Geografis Daerah

Secara Geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2⁰ 19' 00" sampai dengan 3⁰ 27' 00" Lintang Selatan (LS) dan 110⁰ 25' 00" sampai dengan 111⁰ 9' 25" Bujur Timur (BT).

Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2006, Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung.

Kabupaten Sukamara memiliki kondisi topografi yang relatif cukup beragam. Rata-rata daerahnya berada di dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut, sedangkan berdasarkan tingkat kemiringan tanahnya 0 – 15⁰.

Selengkapnya perkecamatan adalah sebagai berikut :

TABEL 1
TOPOGRAFI MENURUT WILAYAH

No	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (meter)	Kemiringan
1	Jelai	0 - 15	0 - 8
2	Sukamara	5 - 30	8 - 15
3	Balai Riam	7 - 100	8 - 15
4	Pantai Lunci	0 - 25	0 - 8
5	Permata Kecubung	7 - 100	8 - 15

Sumber : BPS Sukamara

D. Gambaran Umum Demografis

Luas Wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km² atau 382.700 Ha, terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya serta meliputi 5 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 32 Desa. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Sukamara terdiri dari 20.302 Kepala Keluarga berjumlah 64.994 Jiwa. Luas wilayah perkecamatan beserta penduduknya adalah sebagai berikut :

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Jelai	796	5.928
2	Pantai Lunci	804	6.199
3	Sukamara	1.028	32.712
4	Balai Riam	539	10.858
5	Permata Kecubung	660	9.297
Jumlah		3.827	64.994

Sumber : Disdukcapil & KB Kab. Sukamara

E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Sukamara memiliki banyak sumber daya alam yang belum tergali. maka belum banyak penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menggali potensi yang ada. Beberapa potensi yang ada antara lain adalah sebagai berikut :

a. Potensi Tambang

Batu Permata (Kecubung), lokasi di Kecamatan Balai Riam. Pasir Kuarsa yang berkadar 98 % (SiO_2) sebagai bahan gelas dan kaca, lokasi di Kecamatan Jelai dengan luas penyebaran lebih 764.000.000 M^2 dengan volume cadangan 1.191.840.000 M^3 .

Kaolin yang berkadar 30 % (Al_2O_3) sebagai bahan baku industri keramik dan lain-lain dengan luas penyebaran 64.000.000 M^2 dan volume cadangan 100.250.000 M^3 .

b. Potensi Perikanan

Kabupaten Sukamara memiliki potensi perikanan yang potensial. Hal ini dikarenakan kondisi fisiografis yang sebagian besar merupakan daerah sungai dan laut, terutama di kecamatan Jelai dan Pantai Lunci. Dengan luas laut 555,60 Km^2 , luas perairan umum 4.000 Km^2 dan panjang garis pantai sekitar 75 Km maka sangatlah potensial untuk usaha penangkapan ikan dan juga dapat dikembangkan usaha tambak udang dan bandeng.

c. Potensi Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sektor ekonomi potensial yang ada di Kabupaten Sukamara. Kelapa sawit dan karet merupakan jenis tanaman yang diproduksi di Kabupaten Sukamara, terutama jenis tanaman kelapa sawit yang pada umumnya dikelola oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) dengan pola tanam kemitraan dan inti. Untuk menggali potensi dan meningkatkan penghasilan masyarakat, maka diupayakan perluasan perkebunan milik masyarakat melalui program repivitalisasi perkebunan dengan komoditas karet dan sawit.

d. Potensi Pertanian

Masyarakat Kabupaten Sukamara pada umumnya mengembangkan tanaman padi, palawija dan hortikultura. Realisasi produksi sektor pertanian di Kabupaten Sukamara masih terus ditingkatkan dengan perluasan pemasaran hasilnya.

e. Potensi Peternakan

Untuk sektor peternakan Kabupaten Sukamara memiliki daerah yang cukup potensial untuk mengembangkan ternak sapi, kambing dan ayam buras dan bila memungkinkan dapat juga diperdagangkan ke luar daerah.

f. Potensi Pariwisata

Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Sukamara antara lain hamparan pasir putih sepanjang Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai

Lunci, selain itu terdapat juga Danau Burung, dimana daerah ini memiliki ciri yang tidak dapat ditemui ditempat lain pada musim tertentu disinggahi dan bersarang di sana.

2. Pertumbuhan Ekonomi PDRB

Perekonomian Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 6,07 persen. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 6,38 persen.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Rencana Pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) tahun 2018-2023.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Mengantisipasi tentang suatu kondisi daerah Kabupaten Sukamara di masa datang adalah yang harus di pertimbangkan dari sekarang untuk itu perlu adanya penetapan suatu visi dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara. Tujuannya adalah jelas antara lain mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan strategis masa depan, meningkatnya kualitas persaingan, tantangan dan hambatan yang semakin kompleknya tuntutan masyarakat mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara untuk meningkatkan kinerja dengan senantiasa mengutamakan perubahan kearah perbaikan, perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana konsisten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 :

“ Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Di Kabupaten Sukamara Dengan Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa “

2. Misi

Adanya yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui peran dan Program-program serta hasil yang akan di peroleh diwaktu-waktu yang akan datang. Karena misi merupakan penjabaran secara lebih operasional visi yang telah ditetapkan.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas di Kabupaten Sukamara.

- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik masyarakat.
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya daerah dan organisasi kemasyarakatan.

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dalam implementasi dari pernyataan misi, jika misi merupakan operasionalisasi dari visi, maka tujuan merupakan operasionalisasi dari misi tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam waktu 3-5 tahun. Dengan adanya tujuan, maka fokus dapat lebih dipertajam dalam memberikan arah bagi sasaran yang ingin di capai.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah:

“Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi Daerah yang kondusif, aman, tertib, lancar berkembang dan maju serta terciptanya Ketahanan dan Kesatuan Bangsa Khususnya di Kabupaten Sukamara”

Berdasarkan tujuan tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Terfasilitasinya keberadaan infrastruktur politik sebagai mitra kerja pemerintah.
- b. Terpantaunya keberadaan infrastruktur politik yang partisipatif terhadap pembangun yang demokratis.
- c. Terpacunya kemandirian infrastuktur politik sebagai pilar demokratis.
- d. Terjalinnya hubungan kerjasama interaktif antara sufrastruktur politik dengan infrastruktur politik.
- e. Terfasilitasinya anggota DPRD dan penggantian antar waktu anggota DPRD sebagai lembaga demokrasi daerah.
- f. Terlaksananya pendidikan politik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- g. Terfasilitasinya persiapan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Independen.
- h. Mantapnya pengamalan Pancasila dan tegaknya kedaulatan rakyat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI.
- i. Terbangunnya wawasan kebangsaan dan watak bangsa dalam rangka mewujudkan kepribadian bangsa yang memiliki wawasan global.
- j. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Aspek Strategis

- a. Adanya Forum Kerjasama Antar Umat Beragama yang masih perlu pembinaan;
- b. Terbentuknya Kominda yang harus diikuti dengan langkah-langkah yang konkrit;
- c. Tersedianya Pegawai pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.
- d. Cukup tersedia fasilitas sarana pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.
- e. Adanya semangat membangun dalam pembangunan Daerah.
- f. Adanya kepedulian masyarakat dalam pembangunan Daerah.
- g. Adanya kehidupan masyarakat yang demokratis.
- h. Adanya Ketahanan Sosial Budaya dan Kerukunan hidup antar umat beragama.
- i. Adanya keamanan yang kondusif.

B. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

- a. Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi terhadap infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi demokrasi.
- b. Mengembangkan komunikasi daripada konfrontasi terhadap semua kekuatan bangsa dalam mengembangkan demokratisasi.
- c. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dengan semangat kemitraan kerja antara suprasutruktur dengan infrastruktur politik dalam membangun sistem politik nasional dan proses demokratisasi
- d. Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi
- e. Mengedepankan fasilitasi daripada regulasi atas penyelenggaran peningkatan kesadaran bangsa serta persatuan dan kesatuan bangsa
- f. Memotivasi tokoh agama dalam berperan serta terhadap proses pembauran bangsa demi mantapnya perstuan dan kesatuan.
- g. Memotivasi tokoh-tokoh agama dalam berperan serta terhadp pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai ke-Bhineka Tunggal Ika-an.
- i. Mengedepankan fasilitasi dan regulasi atas penyelesaian konflik-konflik di daerah.
- j. Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi masalah strategis untuk mengacu penyelesaian konflik di daerah.

- k. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar daerah di Kabupaten Sukamara dalam rangka menanggulangi masalah strategis.
- l. Mempercepat jaringan data dan informasi serta pengembangan situasi dan kondisi daerah dalam bidang ipoleksosbud dan deteksi dini terhadap gangguan kantramtibmas.

2. Arah Kebijakan

a. Umum

Dengan semangat reformasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Sukamara harus senantiasa dilandaskan pada kebijakan yang mengarah pada upaya demokratis. Termasuk didalamnya peningkatan dan percepatan proses desentralisasi.

b. Khusus

Mengacu pada landasan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sukamara tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Bidang Politik dalam Negeri

- a) Mengembangkan sistem politik yang demokratis yang bertopang pada kemandirian infrastruktur politik, mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan sufrastruktur, serta makin dewasa sikap politik dan demokratis perilaku akhlak warga pendukung sistem.
- b) Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, serta terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, yang ditopang dengan manajemen Pemilihan Umum yang makin profesional, efektif dan efisien.

2. Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

- a) Memantapkan wawasan dan kesadaran kebangsaan yang menopang kokohnya integrasi dan ketahanan bangsa dalam rangka mempertahankan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat, yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman etika dan moral Pancasila.

3. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- a) Meningkatnya kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi kokohnya integrasi bangsa.
 - b) Mendeteksi dan menganalisa gejala awal secara dini yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
 - c) Mengatasi berbagai konflik sektarian dan konflik sosial dalam masyarakat yang dilandasi dengan kajian strategi yang komprehensif guna memecahkan permasalahan aktual bangsa
 - d) Menciptakan situasi dan kondisi kondusif bagi implementasi kebijakan politik.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
- a) Memantapkan pemahaman pembauran bangsa disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menghormati budaya daerah.
 - b) Memantapkan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama guna peningkatan kerukunan antar umat beragama sebagai suatu cara penekanan terhadap pemicu konflik SARA

C. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Sukamara pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023.

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan akan diuraikan menurut misi-misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Misi 1 : Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas di Kabupaten Sukamara.**

Strategi yang digunakan untuk mencapai misi ini adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat serta Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bela negara di kalangan

masyarakat. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka direncanakan 2 program prioritas, sebagai berikut :

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa.
- 2) Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara.

b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan

2. Misi 2 : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

Strategi yang digunakan untuk mencapai misi ini adalah menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta meningkatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparatur kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka direncanakan 3 program prioritas, sebagai berikut :

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda)

- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparat kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Penanganan gangguan keamanan di Daerah.

3. Misi 3 : Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik masyarakat.

Strategi yang digunakan untuk mencapai misi ini adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka direncanakan 2 program terdiri atas 1 program prioritas sebagai berikut :

- a. Program pendidikan politik masyarakat (Program Prioritas)

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparat kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Pembinaan Partai Politik

- b. Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan peran Serta Institusi di Kabupaten Sukamara dalam rangka menyukseskan Pileg / Pilpres / Pilkada (Pilgub/Pilbup). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

- 1) Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilkada (Pilgub/Pilbup).
- 2) Monitoring Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg / Pilpres / Pilkada (pilgub/Pilbup).

4. Misi 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Strategi yang digunakan untuk mencapai misi ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penerapan ekonomi hijau, penanganan kesenjangan ekonomi, serta peran serta masyarakat dalam memelihara ketahanan sosial dan budaya daerah. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka direncanakan 1 program prioritas, sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat

dalam Peningkatan Toleransi dan Kerukunan setiap umat Beragama serta peran serta masyarakat dalam memelihara Toleransi terhadap Umat Beragama ketahanan sosial dan budaya daerah. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam memperkuat kerukunan umat beragama

Selain program dan kegiatan prioritas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, terdapat juga program dan kegiatan yang bersifat rutin sebagai penunjang kegiatan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum

1. Perangkat Daerah Pelaksana (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Fungsi Urusan Pemerintahan Umum secara Struktural melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Program dimaksud merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada masing-masing daerah di Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembinaan mental, maupun moral bagi Stake Holders antara lain :

- a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- b. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda)
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa
- d. Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara
- e. Penanganan Gangguan Kemanan Di Daerah
- f. Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- g. Pembinaan Partai Politik
- h. Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan
- i. Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilkada (Pilgub/Pilbup)
- j. Monitoring Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg / Pilpres / Pilkada (pilgub/Pilbup)

2. Program dan Kegiatan

Kegiatan/program kerja yang dilaksanakan tahun 2019, pada DPA telah disusun 12 (dua belas) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan. Namun, pada DPPA berkurang menjadi 12 (dua belas) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk pembayaran rekening listrik, telephon dan internet Keluaran dari Kegiatan ini adalah Jumlah Tagihan rekening yang dibayar, Hasil dari Kegiatan ini Tagihan rekening yang dibayar sedangkan Manfaatnya

adalah tersedianya biaya tagihan Rekening Telephon, Listrik dan Internert, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.200.000 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 32.333.968 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar 94,54% capaian serapan anggaran kegiatan ini

b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk pembayaran Surat menyurat / pajak kendaraan dinas/operasional Keluaran dari Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas / operasional Hasil kendaraan dinas / operasional Manfaatnya adalah tersedianya biaya untuk Perijinan Kendaraan Dinas, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 5.002.200 (lima juta dua ribu dua ratus rupiah) atau sekitar 84,78 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk honorarium pegawai administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola Administrasi keuangan dan barang Keluaran dari Kegiatan Termotivasinya dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan Manfaatnya adalah terlaksananya pekerjaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang yang baik, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 116.010.000 (seratus enam belas juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 113.850.000 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 98,14 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja alat dan bahan kebersihan kantor Keluaran dari Kegiatan Jumlah perlengkapan dan peralatan kebersihan hasil Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan Manfaatnya adalah tersedianya peralatan dan bahan kebersihan, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 3.999.500 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 99,99% capaian serapan anggaran kegiatan ini

e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis Kantor Keluaran dari Kegiatan Jumlah alat tulis kantor hasil alat tulis kantor Manfaatnya adalah Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 30.578.710 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau sekitar 99,93% capaian serapan anggaran kegiatan ini

f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja cetak dan penggandaan (penjilidan dan fotocopy) Keluaran dari Kegiatan Jumlah dokumen yang digandakan hasil dokumen yang digandakan Manfaatnya adalah Terpenuhinya Keperluan Cetak dan Penggandaan Kantor, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 25.041.100 (dua puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus rupiah) atau sekitar 79,37% capaian serapan anggaran kegiatan ini

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja Alat listrik dan lampu penerangan kantor Keluaran dari Kegiatan Jumlah komponen penerangan hasil komponen penerangan Manfaatnya adalah Tersedianya peralatan komponen instalasi/penerangan bangunan, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 3.925.800 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar 98,15% capaian serapan anggaran kegiatan ini

h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja Surat Kabar harian/Koran Keluaran Jumlah langganan Koran hasil langganan Koran Manfaatnya adalah Tersedianya Bahan Baca Surat Kabar bagi Aparatur Kesbangpol, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah

Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar 100,00% capaian serapan anggaran kegiatan ini

i. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja tabung gas dan belanja bahan kegiatan pameran pembangunan Keluaran Jumlah Logistik Kantor hasil Logistik Kantor Manfaatnya adalah Tersedianya bahan Logistik Kantor, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar 1,92 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja makan dan minum pegawai kontrak, makan dan minum rapat kantor Keluaran Jumlah makanan untuk rapat intern kantor hasil makanan untuk rapat intern kantor Manfaatnya adalah Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Kontrak dan Makanan dan Minuman Rapat, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.140.000 (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 27.960.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 89,79 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja perjalanan dinas ke luar daerah ASN Badan Kesbangpol Keluaran Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah hasil perjalanan dinas ke luar daerah Manfaatnya adalah Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Kesbangpol, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 319.760.500 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 99,93% capaian serapan anggaran kegiatan ini

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk belanja honorarium tenaga kontrak Badan Kesbangpol Keluaran Jumlah Pegawai Kontrak / Honorer hasil Pegawai Kontrak / Honorer

Manfaatnya adalah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pegawai Kontrak, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 211.260.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 207.055.100 (dua ratus tujuh juta lima puluh lima seratus rupiah) atau sekitar 98,01 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

m. Kegiatan Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Bentuk kegiatan ini bersifat rutin kantor yang digunakan untuk Belanja perjalanan dinas koordinasi dalam daerah ASN Badan Kesbangpol Keluaran Jumlah perjalanan dinas kedalam daerah hasil perjalanan dinas kedalam daerah Manfaatnya Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Kesbangpol, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.246.141,09 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah nol sembilan sen) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 76.720.000 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sekitar 99,32% capaian serapan anggaran kegiatan ini

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini mengakomodir pengadaan kebutuhan peralatan gedung kantor Keluaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Memadai hasil Fasilitas Kantor yang memadai, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 100,00% capaian serapan anggaran kegiatan ini

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini mengakomodir Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional berupa jasa service, penyediaan suku cadang dan penyediaan bahan bakar minyak Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Operasional / Dinas hasil terjaganya kondisi kendaraan Dinas / Operasional, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 126.477.000 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 120.045.550 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 94,91% capaian serapan anggaran kegiatan ini

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini mengakomodir pemeliharaan peralatan kerja Keluaran Terpeliharanya Peralatan Kantor hasil Terjaganya Umur Pakai Peralatan Kerja, manfaat umur pakai peralatan kerja lebih lama anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.075.000 (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 95,42% capaian serapan anggaran kegiatan ini

d. Pengadaan Meubeler

Kegiatan ini mengakomodir belanja kebutuhan meubeler Keluaran Sarana Mebeleair Yang Memadai hasil Tersedianya Sarana Mebeleair Yang Memadai manfaat tercukupinya sarana meubeler kantor untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.275.000 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 10.775.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 95,57 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan belanja pakaian dinas harian ASN Badan Kesbangpol Keluaran Jumlah pakaian dinas hasil pakaian dinas manfaat Peningkatan Disiplin Pegawai dalam berpakaian untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.450.000 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 21.450.000 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 100,00 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan ASN Badan Kesbangpol di dalam daerah maupun di luar daerah Kabupaten Sukamara Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dan kursus hasil Pegawai yang mengikuti diklat dan kursus manfaat Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 26.697.900 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau sekitar 84,76% capaian serapan anggaran kegiatan ini

5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat dimana bentuk kegiatan ini berupa rapat koordinasi seluruh anggota FKDM. Jumlah penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat hasil Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat manfaat tingkat capaian deteksi dini untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.250.000 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 30.130.300 (tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 99,60 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda)

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini berupa rapat koordinasi seluruh anggota Forum Kewaspadaan Pemerintah Daerah serta monitoring situasi IPOLEKSOSBUDKAM di wilayah Kabupaten Sukamara. Jumlah Rakor Kominda dan monitoring ke Kecamatan dan Desa se Kab. Sukamara hasil Rakor Kominda dan monitoring ke Kecamatan dan Desa se Kab. Sukamara manfaat Terdeteksinya secara dini gejala yang terjadi di masyarakat oleh aparat yang tergabung dalam KOMINDA untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar 96,56% capaian serapan anggaran kegiatan ini

7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini mengikuti pelaksanaan Ikrar Bersama Anak Bangsa dan Hari Sumpah Pemuda se Provinsi Kalimantan tengah pada tahun 2019 ini pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lamandau serta melaksanakan kegiatan Upacara hari lahir Pancasila di Kabupaten Sukamara. Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Hari

sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah hasil Peserta yang mengikuti kegiatan Hari sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah manfaat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.755.500 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 128.802.400 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 98,51 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

b. Kegiatan Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini Sosialisasi 4 Pilar untuk Pelajar tingkat SLTA di Kabupaten Sukamara Keluaran Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pelajar hasil Peserta yang mengikuti sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pelajar manfaat Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pelajar kegiatan ini sebesar Rp. 130.755.500 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 128.802.400 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 98,51 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kegiatan ini mengakomodir pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 serta Permendagri nomor 7 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan konflik sosial dimana setiap kabupaten kota wajib menyampaikan pencegahan, penanganan serta pelaporan Tim Terpadu PKS Keluaran Jumlah laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tiap Periode B04, B08 dan B12 Jumlah laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tiap Periode B04, B08 dan B12 hasil laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tiap Periode B04, B08 dan B12 manfaat Tersedianya data dan laporan Penanganan Konflik Sosial Kab. Sukamara kegiatan ini sebesar Rp. 92.965.000 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 91.726.800

(sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar 98,67% capaian serapan anggaran kegiatan ini

9) Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

a. Kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan Rakor anggota FKUB dan pelaksanaan saresehan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukamara Keluaran Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pelajar hasil Peserta yang mengikuti sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pelajar manfaat Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pelajar kegiatan ini sebesar Rp. 60.725.000 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 52.720.000 (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar 86,82% capaian serapan anggaran kegiatan ini

10) Program Dukungan Kelancaran Pemilu

a. Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilkada (Pilgub/Pilbup)

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan posko DESK Pileg dan Pilpres yang melibatkan instansi terkait Keluaran Jumlah Orang dan Hari Pelaksanaan Posko Pemilu hasil Pelaksanaan Posko Pemilu manfaat Terlaksanaan Posko Pemilu kegiatan ini sebesar Rp. 25.510.000 (dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 23.605.000 (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) atau sekitar 92,53% capaian serapan anggaran kegiatan ini

b. Monitoring Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg/Pilpres/Pilkada(pilgub/Pilbup)

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring Tim DESK Pemilu terhadap Pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Rakor dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Keluaran Jumlah Pemantauan Pemantauan Kelancaran Pemilu dan Laporan hasil Jumlah Laporan Pemantauan PEMILU manfaat termonitornya pelaksanaan Pemilu kegiatan ini sebesar Rp. 47.975.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar 97,55 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

11) Program Pendidikan Poltik Masyarakat

a. Kegiatan Pembinaan Partai Politik

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi tim bantuan keuangan partai poitik dalam rangka verifikasi bantuan terhadap Parpol Keluaran Jumlah peserta dari Parpol yang mengikuti kegiatan hasil Peserta dari Parpol yang mengikuti kegiatan manfaat Parpol yang mengikuti kegiatan kegiatan ini sebesar Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 5.775.000 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 93,90% capaian serapan anggaran kegiatan ini

12) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan

Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana diatas dimana bentuk kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi anggota Forum Pembauran Kebangsaan kabupaten Sukamara maupun Rakor FPK se Kalteng Keluaran Jumlah peserta dari Parpol yang mengikuti kegiatan hasil Peserta dari Parpol yang mengikuti kegiatan manfaat Parpol yang mengikuti kegiatan kegiatan ini sebesar Rp. 27.530.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi dari anggaran ini adalah Rp. 26.626.000 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau sekitar 96,72 % capaian serapan anggaran kegiatan ini

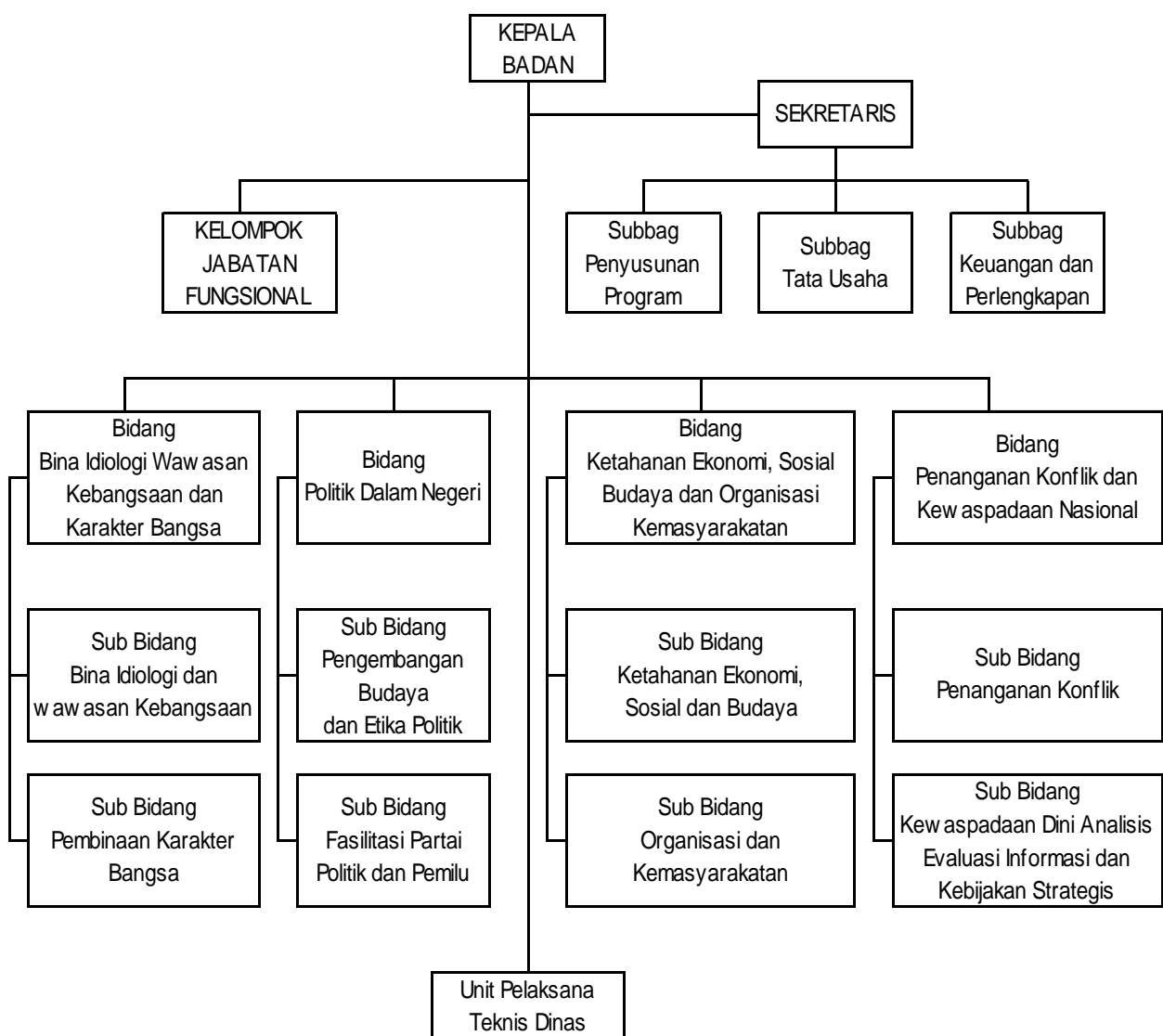
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Susunan Organisasi dan tata kerja

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Tata Usaha;

3. Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :
 - Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
5. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :
 - Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - Sub Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan



b. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kab. Sukamara didukung oleh ASN dan Pegawai Honorer / Kontrak dengan kondisi sebagai berikut.

Tabel 3
Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional

Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Pejabat Struktural	Fungsional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23	15	8

Tabel 4
Jumlah Kualifikasi Pendidikan
Pangkat dan Golongan Pegawai

Status Kepegawaian	Kualifikasi Pendidikan	Jlh (Org)	Gol.	Jlh (Org)	Gol.	Jlh (Org)
Pegawai Negeri Sipil	S.2	-	IV/c	-	IV	5
	S.1	14	IV/b	1	III	13
	D.III	2	IV/a	4	II	5
	D.II	-	III/d	6	I	
	D.I	-	III/c	4		
	SLTA	7	III/b	1		
			III/a	2		
			II/d	4		
			II/c	-		
			II/b	1		
			II/a	-		
			I/d	-		
			I/c	-		
Jumlah		23		23		23

Tabel 5
Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No	Uraian	Pejabat memenuhi syarat kepangkatan	Jumlah jabatan yang ada
1	Kepala	1	-
2	Sekretariat	3	3
3	Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	2	2
4	Bidang Politik Dalam Negeri	2	2
5	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	2	1
6	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	2	2

Tabel 6
Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan diklatpim

No	Uraian	Pejabat		Pejabat yang sudah / belum mengikuti Diklatpim					
		ada	Kosong	II		III		IV	
				Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	Blm
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	4	-	-	-	1	-	3	-
3	Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	-	-	-	1	-	2	-
4	Bidang Politik Dalam Negeri	3	-	-	-	1	-	1	1
5	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	2	1	-	-	1	-	-	1
6	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	3	-	-	-	1	-	2	-

Tabel 7
Jumlah Pegawai Honorer / Kontrak

No	Uraian	Jumlah
1	Petugas Administrasi	7
2	Petugas Pengemudi	1
3	Petugas Kebersihan Kantor (Clening Servis)	1
4	Petugas Jaga Malam	1

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

A. Alokasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan Anggaran Sebesar Rp. 3.797.012.439,09 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah nol sembilan Sen*) Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.229.553.798 (*Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) atau 58,72% dari jumlah alokasi anggaran dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.567.458.641,09 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah nol Sembilan Sen*) atau 41,28% dari jumlah alokasi anggaran, Anggaran 2019 mengalami Penurunan Pagu Anggaran sebesar 2,68% dari Alokasi Anggaran Tahun 2018

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dasar pelaksanaan pembangunan yang disusun secara cermat dan menyeluruh. Kebijakan yang diambil boleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan mendahulukan efisiensi belanja dengan cara pendisiplinan yang lebih ketat terhadap pertanggung jawaban untuk mencegah terjadinya pemborosan keuangan Daerah.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 untuk Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 2.130.589.563 (*Dua Milyard Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 95,56% dari Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam penyerapan Anggaran, Realisasi Penyerapan Anggaran untuk Belanja Langsung adalah Sebesar Rp. 1.505.805.828 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 96,07% dalam penyerapan Anggaran dari pagu Anggaran Belanja Langsung.

Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan setiap Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
5	BELANJA	3.901.641.984,84	3.636.395.391	95,77
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.229.553.798	2.130.589.563	95,56
2.1.1	Belanja Pegawai	2.229.553.798	2.130.589.563	95,56
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.567.458.641,09	1.505.805.828	96,07
5.2.1	Belanja Pegawai	421.460.000	408.045.000	98,25
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.103.398.641,09	1.055.660.828	95,67
5.2.3	Belanja Modal	42.600.000	42.100.000	98,83

Tabel 9
Rincian Realisasi Anggaran 2019

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA	3.797.012.439,09	3.636.395.391	95,77
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.229.553.798	2.130.589.563	95,56

1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.482.210.798	1.415.022.563	95,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	747.343.000	715.567.000	95,75
B.	BELANJA LANGSUNG	1.567.458.641,09	1.505.805.828	96,07
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	892.146.141,09	862.266.878	96,65
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.200.000	32.333.968	94,54
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.900.000	5.002.200	84,78
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	116.010.000	113.850.000	98,14
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	3.999.500	99,99
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	30.600.000	30.578.710	99,93
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.550.000	25.041.100	79,37
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	3.925.800	98,15
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.840.000	15.840.000	100,00
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	10.400.000	200.000	1,92
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	31.140.000	27.960.000	89,79
1.11	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	320.000.000	319.760.500	99,93
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	211.260.000	207.055.100	98,01
1.13	Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	77.246.141,09	76.720.000	99,32
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.502.000	150.880.550	95,19
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.675.000	5.675.000	100,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.477.000	120.045.550	94,91
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.075.000	14.385.000	95,42
3	Program peningkatan disiplin aparatur	21.450.000	21.450.000	100,00
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21.450.000	21.450.000	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.500.000	26.697.900	84,76
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	31.500.000	26.697.900	84,76
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	30.250.000	30.130.300	99,60

5.1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	30.250.000	30.130.300	99,60
6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	26.200.000	25.300.000	96,56
6.1	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda)	26.200.000	25.300.000	96,56
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	146.555.500	141.827.400	96,77
7.1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	130.755.500	128.802.400	98,51
7.2	Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara	15.800.000	13.025.000	82,44
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	92.965.000	91.726.800	98,67
8.1	Penanganan Gangguan Kemanan Di Daerah	92.965.000	91.726.800	98,67
9	Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	60.725.000	52.720.000	86,82
9.1	Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama	60.725.000	52.720.000	86,82
10	Program Dukungan Kelancaran Pemilu	73.485.000	70.405.000	95,81
10.1	Posko Tim Koordinasi Pileg / Pilpres / Pilkada (Pilgub/Pilbup)	25.510.000	23.605.000	92,53
10.2	Monitoring Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg / Pilpres / Pilkada (pilgub / Pilbup)	47.975.000	46.800.000	97,55
9	Program pendidikan politik masyarakat	6.150.000	5.775.000	93,90
9.1	Pembinaan Partai Politik	6.150.000	5.775.000	93,90
10	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	27.530.000	26.626.000	96,72
10.1	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	27.530.000	26.626.000	96,72

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sukamara khususnya di bidang kesatuan bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara telah menyusun Rancangan RENSTRA 2018-2023, RENJA Tahun 2019 dan RKA Tahun 2019 yang telah disahkan menjadi DPA Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Dari 15 (empat belas) program yang telah disusun di RENSTRA periode 2018-2023 terakomodir semua didalam RENJA, namun pada RKA hanya

terakomodir 12 (dua belas) Program kegiatan pada RKA, dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. yang berdampak adanya program dan kegiatan yang pelaksanaannya ditunda ke tahun berikutnya.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Penatausahaan barang milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan prinsip efisien, efektif dan pemanfaatan secara optimal.

Disamping itu Penatausahaan Barang telah dilaksanakan sesuai tertib adminidstrasi dan petunjuk teknis.

Sampai saat ini sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara masih perlu peningkatan atau penambahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang saat ini dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana untuk alat pendukung tugas pekerjaan dimana alat-alat yang harusnya tidak layak pakai masih dipaksakan untuk digunakan sehingga memakan biaya dalam perawatan alat-alat penunjang kerja tersebut agar dapat digunakan secara maksimal.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk tahun anggaran 2019 nilai asset yang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 10
Keadaan Aset Badan Kesbangpol

NO	URAIAN	Aset Tetap				Jumlah Aset Tetap	
		Aset Baik		Aset Kurang Baik			
		Jlh Brg	Jumlah Harga	Jlh Brg	Jumlah Harga	Jlh Brg	Jumlah Harga
1	Tanah	-	-	-	-	-	
1.1	Tanah	-	-	-	-	-	
						-	
2	Peralatan dan Mesin	382	1.635.703.433,33	-	-	382	1.635.703.433,33
2.1	Alat – alat besar	7	323.959.000,00	-	-	7	323.959.000,00
2.2	Alat – alat Angkutan	-	-	-	-	-	-
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
2.4	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	308	1.107.596.433,33	-	-	308	1.107.596.433,33
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	55	172.750.000,00	-	-	55	172.750.000,00
2.7	Alat – alat kedokteran	-	-	-	-	-	-
2.8	Alat Laboratorium	12	31.398.000,00	-	-	12	31.398.000,00
2.9	Alat – alat persenjataan dan keamanan	-	-	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	6	1.648.077.499	-	-	6	1.648.077.499
3.1	Bangunan Gedung	6	1.648.077.499	-	-	6	1.648.077.499
3.2	Monumen	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
4.1	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	-	-	-	-	-	-
4.3	Instalasi	-	-	-	-	-	-
4.4	Jaringan	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1	2.920.000,00	-	-	1	2.920.000,00
5.1	Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	
5.2	Barang bercorak kebudayaan				-	-	
5.3	Hewan dan Ternak serta Tanaman				-	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				-	-	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan				-	-	
TOTAL							

Rekapitulasi Asset Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara tahun 2019 sebagai berikut

Tabel 11
Rekapitulasi Aset

NO	Jenis Asset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Asset Tetap Ekstrakomptable	-	-
2	Asset tetap Intrakomptable	3.286.700.932,33	-
Jumlah		3.286.700.932,33	-

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2019 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Aset

NO	Jenis Asset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Asset Tetap Ekstrakomptable	-	-
2	Asset tetap Intrakomptable	-	-
Jumlah		-	-

7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut:

- o Kurangnya Aparatur Sipil Negara terutama pada tingkat JFU dan masih ada Jabatan yang belum terisi
- o Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana
- o Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja

b. Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut:

- o Menambah Pegawai pada tingkat JFU / memberikan Bimbingan teknis pada Pegawai yang ada guna peningkatan SDM dan mengisi Jabatan yang masih kosong

- Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif
- Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (Sara dan Konflik Lainnya)

Beberapa kerawanan yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sukamara selama Tahun 2019 antara lain :

- a. Dibidang ideologi, masuknya pengaruh paham radikalisme, separatisme, dan paham yang mengalihkan kaidah / norma agama, hukum, adat dan budaya sehingga harus diwaspadai. Salah satu permasalahan yang muncul di Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 adalah adanya kegiatan masyarakat yang mengatas namakan suatu organisasi yang saat ini oleh Pemerintah republik Indoneia Organisasi ini dinyatakan terlarang yaitu HTI,namun Badan Kesbangpol bertindak cepat bersama instansi terkait sehingga tidak sempat berkembang.

Ironisnya banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sukamara yang terlibat dalam organisasi terlarang ini kebanyakan dari ASN yang terlibat adalah tenaga pendidik/guru.

- b. Dibidang pertahanan, keamanan dan sosial budaya, beberapa permasalahan yang ada selama tahun 2019 antara lain
 - Konflik antara korporasi perkebunan sawit dengan masyarakat dan Pemerintah masih sering terjadi diantaranya adalah :
 - Pembukaan sebagian Lahan Bukit Patung untuk perkebunan Sawit oleh PT. Sungai Bila Estate (SBE) sebagaimana diketahui bukit patung merupakan lahan konserpasi hutan dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dimana perusahaan tersebut membuka ijin lahan tanpa perijinan terlebih dahulu pada Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Kecamatan Balai Riam dalam hal tindakan terhadap PT SBE dalam proses penyelesaian oleh Pemerintah Daerah
 - Sengketa lahan Sawit di Blok C 16 di Desa Kenawan antara Perusahaan PT. SKM dengan warga desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung yang bernama Juntak, proses masih dalam tahap penyelesaian
 - Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikalangan masyarakat dari berbagai umur yang masih marak. Menurut data yang dirilis oleh BNNK Kabupaten Sukamara pada bulan

Desember 2019, di Kabupaten Sukamara terdapat 347 jiwa pencadu narkoba dari total penduduk 64.994 jiwa

2. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam hal menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara memiliki visi "Mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik di Kabupaten Sukamara dengan menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa". Dan untuk mewujudkan visi tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara menetapkan misi, antara lain

- 1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik masyarakat;
- 4) Meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan budaya daerah;

Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara melaksanakan sosialisasi baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan kepada generasi muda/Pelajar dan tenaga pendidik, maupun Ormas/LSM tentang ideologi dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat pengamalan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, sehingga generasi muda mengerti dan memahami perlunya menegakkan persatuan dan kesatuan, dan demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan turut menjaga stabilitas, ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan tersebut dibantu juga oleh forum-forum yang berada dibawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara melakukan kerja sama dengan aparat keamanan dan seluruh intelijen yang ada di dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) serta sejumlah instansi terkait.

1. Forum Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan koordinasi

dengan instansi vertikal berdasrkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah yaitu kegiatan dalam melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya Konflik yaitu Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda) dan Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama

2. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi Vertikal yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda) dan Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama adalah :

- a. Kepolisian Republik Indonesia (Polres Sukamara)
- b. Kejaksaan Negeri Sukamara
- c. TNI dalam hal ini Perwira Penghubung Kodim 1014 P.Bun Panju Panjung
- d. Badan Intelijen Negara (BIN)/Kapos BIN Area P.Bun Sukamara Lamandau
- e. Kantor Kementrian Agama

3. Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran untuk mendukung kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal sebagai berikut dibawah ini :

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda) pada tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.200.000 (*Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- b. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.250.000 (*Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- c. Kegiatan Penanganan Gangguan Kemanan Di daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92.965.000 (*Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

4. Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Kegiatan – Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Koordinasi ini adalah sebagai Berikut :

- a. Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

1. Pemantauan dan Pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara dalam rangka deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya konflik dan gejolak di masyarakat terutama konflik berbasis SARA, anarkisme, sparatisme atau lainnya
 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) hasil dari setiap pemantauan kemungkinan konflik dan gejolak Kamtibmas di Masyarakat
 3. Pendataan potensi konflik dan Kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara
- b. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Anggota FKDM dari hasil pemantauan masyarakat situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah kabupaten Sukamara
 2. Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan di wilayah Kabupaten Sukamara masalah situasi dan Kondisi Kamtibmas.
- c. Kegiatan Penanganan Gangguan Kemanan Di Daerah
1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukamara
 2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaksanakan Pencegahan Konflik, Penanganan Konflik serta Penanganan Pasca Konflik bila terjadi.
 3. Memberikan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara berkala pada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Polpum melalui Gubernur Kalimantan Tengah Cq Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
5. Hasil dan Manfaat
- a. Hasil
1. Hasil dari Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Terdeteksinya secara dini gejolak dan konflik yang mungkin terjadi.
 2. Hasil dari Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai langkah penanganan antisipasi kantibmas yang melibatkan Masyarakat.
 3. Hasil Penanganan Gangguan Kemanan Di Daerah adalah mendeteksi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap jalannya roda Pemerintahan

b. Manfaat

1. Manfaat Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Terantisipasi konflik berbasis SARA, anarkisme, spearatisme atau tindak kriminal lainnya secara dini sehingga bisa dicegah sedini mungkin dan tersedianya data kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara.
2. Manfaat Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melibatkan masyarakat dalam rangka antiusipasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sukamara
3. Manfaat Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan Di Daerah adalah koordinasi yang cepat tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial apabila ada Gejala AGHT dan tersedianya laporan dari masing-masing yang terlibat dalam tim

6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

1. Tindak lanjut kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) melaporkan hasil pemantauan situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sukamara kepada Bupati Sukamara selaku Ketua KOMINDA dan kepada Pimpinan Instansinya masing - masing untuk menunggu perintah selanjutnya.
2. Tindak lanjut untuk kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Informasi Masyarakat cepat diresapon.
3. Tindak lanjut untuk kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Informasi Masyarakat cepat diresapon.

B. Indikator Kinerja Kunci

LAMPIRAN III.2

TABEL 12
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN SUKAMARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis)	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis)	Sebutkan program yang berkaitan dengan 1. Program Pendidikan Poltik Masyarakat - Anggaran : 6.150.000 - Realisasi : 6.150.000	1 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Cq. Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah keberadaan SOP	Apabila ada: Sebutkan ada sebanyak 0 SOP terdiri dari: 1. SOP Penerbitan Berita Acara Administrasi Bantuan Keuangan PARPOL	ada 1 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan 1. PERDA Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada (termasuk yang kosong) x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 - Jabatan yang ada sebanyak 17 15 / 17 x 100 %	0,88%	Sumber Data: DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila ada: TIDAK ADA	Tidak Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS Daerah	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 23 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 1.930 orang $23 / 1.930 \times 100\%$	0,0016%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat pada Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 15 orang $13 / 15 \times 100\%$	0,87%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 15 orang - Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan $15 / 17 \times 100\%$	0,88%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada atau tidak adanya dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada atau tidak ada dokumen yang dimaksud. Apabila ada: Ada sebanyak 3 jenis yang terdapat: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada sebanyak 3 Jenis Dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA x 100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 12 program Jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 12 Program $12 / 12 \times 100\%$	1,00%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA sebanyak 12 program - Jumlah program RKA Perangkat Daerah sebanyak 12 program $12 / 12 \times 100\%$	1,00 %	
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 12 program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 12 program $12 / 12 \times 100\%$	1,00 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp.3.797.012.439,09 - Total Belanja APBD sebesar Rp. 747.683.961.610,89 Rp. 3.797.012.439,09/747.683.961.610,89 X 100%	0,005 %	Anggaran
		Realisasi belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.636.395.391 - Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 656.561.697.599,04 Rp. 3.636.395.391 / Rp. 656.561.697.599,04 x 100%	0,006 %	Realisasi unaudited
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah terhadap total realisasi belanja Perangkat Daerah	Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.505.805.828 - Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.636.395.391 1.505.805.828 / 3.636.395.391 X 100%	0,41%	Realisasi unaudited
			16	Realisasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah terhadap total dari total realisasi belanja Perangkat Daerah	Realisasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah dibagi total dari total realisasi belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.130.589.563 - Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.3.636.395.391 2.130.589.563 / 3.636.395.391 x 100%	0,59%	Realisasi unaudited
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak adanya Laporan Keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, CaLK)	Apabila ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Asset Perangkat daerah	18	Adanya inventarisasi barang/aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak adanya inventarisasi barang / aset Perangkat Daerah	Apabila ada: Sebutkan jenis dokumennya Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 Tahun
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 0 - Aset yang dikuasai sebesar Rp.1.638.623.433,33 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media massa	Jumlah fasilitas / prasarana informasi/partisipasi	Apabila ada, sebutkan 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada: TIDAK ADA	Tidak Ada	Survey Kepuasan terhadap pelayanan Perangkat Daerah

TABEL 14
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN SUKAMARA

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak ... paket}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sebanyak 4 paket}} \times 100\%$	0%	Sumber Data: Bagian Perekonomian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan sebesar Rp. 42.600.000}}{\text{Total belanja langsung (APBD) sebesar Rp. 375.404.292.992,82}} \times 100\%$	1,13%	Sumber Data: seluruh Perangkat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah sebanyak 1 kegiatan	1 Kegiatan	Sumber Data: Badan Kesbangpol
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP sebanyak 0 kegiatan	0 Kegiatan	Sumber Data: Badan Kesbangpol

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2019 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.

Penyelenggaraan kegiatan di kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan Kinerja, sehingga visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dapat terwujud. Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya diharapkan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Sukamara, 2 Maret 2020
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara


SUTRISNO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19690918 199012 1 003